



Transformasi pelayanan digital terpadu dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik

Sri Maryuni, Pardi, Deni Darmawan, Eka Apriyani*, Rudianto, Putri Zesa, Wanda Selpiani

Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

*email Koresponden Penulis: eka.apriyani@fisip.untan.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2024-08-17

Diterima: 2024-09-29

Diterbitkan: 2024-10-10



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2024 Penulis

ABSTRAK

Transformasi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam kaitannya dengan keterbatasan sumber daya, teknis, finansial, dan infrastruktur. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) dan Focus Group Discussion (FGD), berbagai masalah dapat diidentifikasi, termasuk kurangnya keterampilan staf dalam pengelolaan teknologi digital dan terbatasnya pendanaan. Hasil FGD menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan, strategi implementasi dapat difokuskan pada pelatihan teknis, integrasi sistem layanan, dan kolaborasi dengan universitas serta sektor-sektor swasta yang ada. Pelatihan staf perpustakaan mengenai teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis mereka dalam mendukung transformasi pelayanan digital. Selain itu, perlu adanya upaya pencarian sumber pendanaan alternatif seperti hibah dan sponsor untuk mendukung keberlanjutan program ini. Hasil evaluasi dari kegiatan PKM ini menunjukkan peningkatan pemahaman akan pentingnya transformasi digital dan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan, meskipun realisasi penuh membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Kata Kunci: pelayanan terpadu; perpustakaan; transformasi digital

Cara mensitasi artikel:

Maryuni, S., Pardi, Darmawan, D., Apriyani, E., Rudianto, Zesa, P., & Selpiani, W. (2024). Transformasi pelayanan digital terpadu dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 1011-1028. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22479>

PENDAHULUAN

Transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional di Indonesia merupakan respons terhadap perubahan global dalam era digital yang semakin mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik (Guridno & Roshinta, 2024). Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menghadapi tekanan untuk mempercepat transformasi digital guna meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan publik. Di Indonesia, transformasi digital menjadi imperatif untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berbagai tantangan yang



dihadapi, seperti geografis yang kompleks dan tingkat penetrasi internet yang belum merata, membutuhkan pendekatan yang holistik dalam membangun infrastruktur digital yang inklusif dan terpadu.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya integrasi layanan digital nasional untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas publik, mengatasi fragmentasi system, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Melalui Peraturan Presiden, pemerintah berkomitmen mempercepat transformasi digital dengan membangun infrastruktur, mengintegrasikan layanan publik melalui standar interoperabilitas, serta mengembangkan aplikasi SPBE yang sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, keamanan siber, perlindungan data, dan pelatihan tenaga kerja birokrasi juga menjadi prioritas. Pengawasan dan evaluasi rutin diterapkan untuk memastikan tercapainya tujuan transformasi digital, sesuai visi dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023.

Melihat tantangan ini, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, sebuah badan multistakeholders yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, mengambil langkah konkret untuk mendorong Indonesia menuju era digital. Dewan tersebut menekankan pentingnya transformasi digital secara nasional, seperti yang disampaikan oleh Anggota Tim Pelaksana Wantiknas, Ashwin Sasongko, saat membuka acara *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Arah Strategi Transformasi Digital di Indonesia pada akhir Januari 2020. Ashwin menegaskan urgensi transformasi digital untuk kesejahteraan masyarakat (Wantiknas, 2020).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional di tingkat lokal. Sebagai penjaga informasi dan dokumen penting pemerintah daerah, dinas ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan data dan informasi yang efisien dan efektif. Dalam era digital saat ini, transformasi digital menjadi kunci dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan yang diberikan oleh dinas tersebut kepada masyarakat. Melalui transformasi digital dapat memodernisasi sistem pengelolaan informasi dari format fisik menjadi digital. Hal ini akan memungkinkan akses lebih mudah dan cepat terhadap koleksi perpustakaan dan arsip daerah, serta memfasilitasi pencarian dan penggunaan informasi oleh masyarakat secara online. Selain itu, dengan mengembangkan aplikasi atau *platform* digital, dinas ini dapat meningkatkan interaksi dan layanan publik dengan memberikan kemungkinan seperti peminjaman buku online, konsultasi referensi, dan permintaan informasi arsip secara elektronik.

Kolaborasi dengan inisiatif nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 sangat penting. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat berperan dalam integrasi layanan digital nasional dengan mengikuti standar yang memastikan interoperabilitas. Hal ini memungkinkan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur digital lokal sekaligus mendukung transformasi digital nasional. Pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mengurangi biaya, dan mempercepat respons terhadap masyarakat. Melalui langkah ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat menjadi

agen perubahan dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Kubu Raya, sejalan dengan visi transformasi digital nasional.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak akan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang diharapkan akan menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital dan memastikan keterpaduan layanan digital nasional di tingkat lokal. Dalam FGD ini, tim PKM beserta staf dinas, akademisi, praktisi, teknologi, dan masyarakat sipil, dapat berkumpul untuk mendiskusikan tantangan peluang, dan strategi terkait dengan transformasi digital. Diskusi dalam FGD akan memungkinkan identifikasi tantangan konkret yang dihadapi oleh dinas terkait dalam mengadopsi teknologi digital dan memastikan interoperabilitas layanan. Dari diskusi ini, dapat dirumuskan rencana aksi yang konkret untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas staf, dan pengembangan aplikasi layanan digital yang relevan.

Selain itu FGD juga akan membantu dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman staf dinas tentang pentingnya transformasi digital, serta memperluas pemahaman staf dinas tentang pentingnya transformasi digital, serta memperluas jaringan kolaborasi dengan instansi terkait lainnya. Dengan membangun visi bersama tentang transformasi digital yang diinginkan, dinas dan pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja sama untuk mewujudkan perubahan yang signifikan dalam layanan publik di Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, FGD di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kubu Raya akan menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital dan mencapai keterpaduan layanan digital nasional di tingkat lokal.

Majduddin dan Tata Sutabri meneliti implementasi aplikasi terpadu satu pintu dalam metaverse untuk meningkatkan layanan digital di PT Fiber Network Indonesia. Dengan menggunakan kerangka ITIL V3, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan memperbaiki proses layanan digital melalui analisis dokumen, wawancara, dan observasi. Hasilnya menunjukkan peningkatan positif dalam pengelolaan layanan, meskipun masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang efektivitas aplikasi terpadu di sektor telekomunikasi (Majduddin & Sutabri, 2024).

Dengan demikian, kebaruan dari artikel ini menitikberatkan pada peran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung keterpaduan layanan digital nasional melalui transformasi di tingkat lokal. Penekanan diberikan pada implementasi kebijakan nasional, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan kompetensi staf lokal. Selain itu, pendekatan holistik dalam pengelolaan informasi, termasuk pengembangan inovasi layanan digital seperti peminjaman buku secara online dan akses arsip elektronik, yang kemudian diidentifikasi sebagai langkah kunci dalam memperkuat layanan publik serta mempercepat proses transformasi digital di daerah.

METODE

Metode *Participatory Action Research* (PAR) sangat relevan dengan pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang digunakan oleh Tim PKM FISIP Untan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Watters dkk., *Participatory Action Research* (PAR) adalah sebuah metode penelitian yang melibatkan semua pihak secara aktif dalam menelaah dan mengevaluasi proses yang sedang berlangsung (Putri & Sembiring, 2021). PAR sering disebut sebagai penelitian yang menjadikan masyarakat sebagai partisipan utama dalam kegiatan tersebut karena menekankan kolaborasi erat antara peneliti dan masyarakat dalam memahami dan mengatasi permasalahan bersama. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mendorong perubahan dan perbaikan menuju arah yang lebih positif. Dengan menggunakan metode PAR, persiapan awal yang dilakukan tim pengelola kegiatan PKM yaitu menyusun panduan diskusi yang mencakup topik-topik terkait, seperti kebutuhan masyarakat akan informasi dan pengetahuan, harapan terhadap perpustakaan dan arsip daerah serta hambatan yang dihadapi dalam mengakses layanan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan tanggal 4 Juli 2024 melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah persiapan yang mencakup tahapan orientasi FGD meliputi persiapan, pengantar, presentasi materi, diskusi untuk identifikasi tantangan dan solusi, penyusunan rencana tindak lanjut, serta evaluasi dan penutupan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan yang mencakup penyampaian materi serta diskusi atau FGD. Tahapan terakhir melakukan evaluasi dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta, menganalisis hasil diskusi, menilai sejauh mana tujuan FGD telah tercapai, serta mencatat temuan dan rekomendasi untuk tindak lanjut dan menyusun laporan evaluasi.

Peserta yang terlibat dalam FGD adalah sebanyak 20 orang. Selama sesi FGD dilakukan peserta akan diajak untuk berbagi pengalaman, pandangan, dan ide-ide tentang peningkatan layanan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Kubu Raya. Kemudian diskusi akan difasilitasi sehingga semua peserta memiliki kesempatan untuk berbicara dan berkontribusi. Hasil dari FGD akan menjadi landasan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam merancang program-program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, FGD diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan layanan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Kubu Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim PKM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang diketuai oleh Ibu Dr. Sri Maryuni, M.Si., kembali berkoordinasi dengan pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan PKM yang dilaksanakan berupa *Focus Group Discussion* (FGD), yang diawali dengan orientasi di lokasi mitra. Pada tahap ini, diadakan diskusi dan koordinasi terkait kegiatan yang akan dilakukan meliputi penentuan jadwal, target peserta, dan aspek teknis lainnya. Tim PKM FISIP UNTAN

kemudian mempersiapkan fasilitas dan perlengkapan di lokasi kegiatan demi terlaksananya kegiatan tersebut secara maksimal. Keseluruhan proses, mulai dari persiapan hingga pembuatan laporan, berlangsung dari bulan Juni hingga Agustus 2024.

Tim PKM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura juga melakukan evaluasi untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi ini melibatkan feedback dari peserta dan mitra untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan. Selain itu, tim PKM juga berkomitmen untuk melakukan penyesuaian apabila diperlukan agar hasil dari *Focus Group Discussion* (FGD) dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Laporan akhir dari kegiatan ini akan disusun dengan mencakup semua aspek pelaksanaan serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2024, yang berfokus pada penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Transformasi Pelayanan Digital Terpadu” di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kubu Raya. FGD ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung proses digitalisasi dalam pelayanan publik, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan perpustakaan serta kearsipan di daerah tersebut. Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk kontribusi akademik dan profesional dalam mendorong inovasi dan pembaruan layanan publik yang berbasis teknologi.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan FGD ini melibatkan berbagai pihak, diantaranya Tim PKM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dan perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Diskusi ini dimulai dengan pemaparan mengenai tantangan dan kebutuhan dalam penerapan teknologi digital dalam layanan perpustakaan dan kearsipan. Para peserta diberikan kesempatan untuk berdialog, berbagi pengalaman, dan mengusulkan solusi inovatif untuk meningkatkan pelayanan digital yang lebih terpadu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selama FGD, berbagai topik dibahas, termasuk strategi implementasi teknologi, integrasi sistem, dan peningkatan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Para peserta aktif terlibat dalam menyusun rekomendasi dan

langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengoptimalkan transformasi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi pengembangan dan penerapan solusi digital yang efektif dan efisien.

Dengan terselenggaranya FGD ini, diharapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kubu Raya dapat memperoleh wawasan yang mendalam mengenai praktik terbaik dalam pelayanan digital. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara berbagai pihak dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) saat ini mengambil tema “Transformasi Pelayanan Digital Terpadu” yang berlokasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kubu Raya. Dalam hal ini, transformasi yang dimaksud membahas tentang Strategi Kebijakan Transformasi Digital SPBE, SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, dan Standar Teknis SPBE.

Transformasi digital merupakan sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi teknologi digital dalam rangka memperkuat daya saing nasional (Ngamal & Perajaka, 2021). Dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi terbaru, negara, diharapkan dapat mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan peluang ekonomi bery. Langkah ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan, memastikan bahwa negara ini tetap kompetitif di pasar global, serta memfasilitasi perkembangan sektor-sektor penting yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 2. Strategi kebijakan transformasi digital SPBE

Transformasi digital dalam pemerintahan kini bukan sekedar pilihan, melainkan sudah menjadi keharusan (Pangandaheng et al., 2022). Pemerintah harus menerapkan teknologi digital dalam setiap aspek urusan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan mengintegrasikan solusi digital, pemerintah dapat mempercepat proses administrasi, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan mengelola sumber daya dengan lebih efektif. Penerapan transformasi digital ini menjadi langkah

krusial untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman dan memenuhi kebutuhan publik secara optimal.

Hal tersebut menjelaskan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan telah beralih dari sekedar pilihan menjadi suatu keharusan yang mendesak. Transformasi ini dianggap esensial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintah. Dengan mengadopsi teknologi digital, pemerintah dapat mempercepat proses administrasi dan menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta mengelola sumber daya dengan lebih efektif. Selain itu, penerapan teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman dan tuntutan modern, memastikan bahwa mereka tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan publik. Secara keseluruhan, transformasi digital diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga negara (Firdaus et al., 2021).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk menyediakan layanan kepada pengguna SPBE (Prawira & Paraniti, 2023). Tujuan utama dari penerapan SPBE adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, sambil memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi dalam berbagai aspek pemerintahan.

Penerapan Sistem Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pendorong utama dalam transformasi digital bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan layanan publik melalui penggunaan teknologi elektronik. Fokus utamanya adalah mencapai tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap SPBE, dengan harapan bahwa masyarakat akan mengaitkan SPBE dengan pemerintahan yang akuntabel dan layanan yang berkualitas. Dengan demikian, SPBE tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan pemerintah adalah positif dan memuaskan.

Hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total 621 instansi yang dievaluasi, hanya 24 instansi yang mendapatkan predikat memuaskan, mencakup sekitar 3,86% dari keseluruhan. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada beberapa instansi yang berhasil mencapai standar tinggi, sebagian besar instansi belum mencapai tingkat kinerja yang sangat baik dalam penerapan SPBE. Indeks SPBE Nasional tahun 2023 berada pada angka 2,79 dengan predikat baik, yang menunjukkan bahwa penerapan SPBE di tingkat national umumnya positif namun belum optimal, dengan banyak ruang untuk perbaikan (Amryudin et al., 2022).

Di tingkat regional, Kalimantan Barat menunjukkan hasil yang lebih baik, dengan 60% instansi di wilayah tersebut mencapai status baik dalam penerapan SPBE. Ini menunjukkan kemajuan yang signifikan di wilayah tersebut dibandingkan dengan rata-rata national, namun masih terdapat instansi yang perlu meningkatkan kinerjanya. Evaluasi ini memberikan gambaran yang jelas

tentang keadaan saat ini dan menekankan perlunya upaya tambahan untuk mencapai standar yang lebih tinggi di seluruh instansi, baik ditingkat nasional maupun regional.

Presiden telah menetapkan Arsitektur Sistein Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional melalui Peraturan Presiden No. 132/2022, menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat integrasi dan penerapan SPBE (Yustisiawandana & Aji, 2024). Langkah ini menunjukkan tekad pemerintah untuk mengoptimalkan sistem SPBE dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan implementasi SPBE dapat lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga mampu mencapai standar pelayanan yang lebih baik dan memenuhi ekspektasi masyarakat.

Peraturan tersebut menetapkan bahwa Arsitektur SPBE Nasional merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa penerapan SPBE di seluruh instansi pemerintah berjalan secara terintegrasi dan konsisten. Arsitektur ini menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terperinci untuk pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan, termasuk strndar, pedoman, dan prosedur yang harus diikuti. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berupaya untuk menghilangkan fragmentasi dan tumpang tindih dalam sistem SPBE, serta menciptakan keselarasan antar berbagai sistem dan aplikasi yang digunakan di berbagai lembaga.

Selain itu, penetapan Arsitektur SPBE Nasional juga mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Dengan mengintegrasikan sistem SPBE secara menyeluruh, diharapkan dapat memperbaiki proses administrasi, mempercepat respon terhadap permintaan masyarakat, dan menyediakan informasi yang lebih akurat dan realtime. Ini bertujuan untuk memenuhi ekspektasi publik akan pelayanan yang lebih efisien dan berkualitas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implementasi yang berhasil dari Arsitektur SPBE ini akan menjadi indikator penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang lebih baik dan responsif.

Proses evaluasi SPBE yang dilaksanakan bukan hanya dalam rangka berlomba-lomba mendapatkan nilai tertinggi (Yustisiawandana & Aji, 2024). Proses evaluasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperoleh nilai tertinggi atau mencapai pemeringkatan nasional. Lebih dari itu, evaluasi ini dirancang untuk memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan SPBE di setiap instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memahami kekuatan dan kelemahan dalam implementasi SPBE yang ada, serta fungsi dari sistem tersebut dalam konteks operasional masing-masing instansi.

Selain itu, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya perbaikan. Dengan memetakan area-area yang memerlukan peningkatan, instansi dapat merencanakan tindakan yang lebih efektif untuk memperbaiki dan mengoptimalkan penerapan SPBE. Proses ini tidak hanya membantu dalam mencapai standar yang lebih tinggi, tetapi juga

memastikan bahwa SPBE dapat berfungsi dengan optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi administrasi pemerintahan.

Berdasarkan hal di atas, maka proses evaluasi SPBE memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar mencapai nilai atau pemeringkatan tinggi. Evaluasi berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan SPBE di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan sistem. Dengan cara ini, evaluasi SPBE tidak hanya membantu dalam memperbaiki kinerja dan efektivitas sistem, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi secara keseluruhan.

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2021 menetapkan aturan-aturan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di wilayah tersebut. Peraturan ini mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan penerapan SPBE berjalan dengan baik dan efektif. Pertama, tata kelola SPBE yang diatur dalam peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi pelaksanaan SPBE (Choirunnisa et al., 2023). Kedua, manajemen SPBE dijelaskan untuk memastikan bahwa semua sumber daya, baik manusia maupun teknologi, dapat dikelola secara optimal. Ketiga, peraturan ini juga mencakup audit teknologi informasi dan komunikasi, yang bertujuan untuk mengawasi dan menilai efektivitas serta keamanan sistem yang digunakan. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang penyelenggara SPBE, yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi dan pengelolaan SPBE. Terakhir, pemantauan dan evaluasi SPBE diatur untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan selalu ditinjau dan diperbaiki sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2021 bertujuan untuk mendukung transformasi digital dalam pemerintahan daerah dengan mengatur setiap aspek penting dari SPBE.

Tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Kubu Raya (KKR) mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pertama, SPBE memberikan acuan, pedoman, dan panduan pelaksanaan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kedua, SPBE berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Ketiga, tujuan SPBE termasuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang tidak hanya meningkatkan pelayanan publik tetapi juga pelayanan non-publik, sehingga berbagai aspek pemerintahan dapat berjalan lebih lancar dan responsif. Terakhir, SPBE bertujuan menciptakan sinergi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis TIK, memastikan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik dalam pemerintahan daerah.

Prinsip-prinsip dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di pemerintahan daerah mencakup beberapa aspek penting guna memastikan implementasinya berjalan secara efektif dan efisien. Prinsip efektivitas menekankan optimalisasi penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan untuk menghasilkan hasil maksimal. Prinsip keterpaduan menggarisbawahi pentingnya pengintegrasian sumber daya guna menciptakan sinergi dalam pelaksanaan SPBE. Kesenambungan menekankan pengembangan berkelanjutan melalui perencanaan matang, implementasi bertahap, dan penyesuaian sesuai perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Efisiensi mengutamakan penggunaan sumber daya secara optimal agar tidak ada pemborosan. Prinsip akuntabilitas memastikan setiap elemen SPBE memiliki tanggung jawab yang jelas, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Interoperabilitas mendorong kolaborasi yang efektif antara proses bisnis dan sistem elektronik, memungkinkan pertukaran data dan layanan berjalan dengan lancar. Terakhir, prinsip keamanan menekankan perlindungan terhadap kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan keaslian data, memastikan informasi tetap aman dari ancaman atau gangguan (Rusdy & Flambonita, 2023).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan SPBE di pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan bahwa SPBE diterapkan dengan cara yang paling efisien dan efektif, tetapi juga menjaga integritas dan keamanan sistem, serta memastikan adanya akuntabilitas dan interoperabilitas yang tinggi. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memberikan layanan publik yang lebih baik, transparan, dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.



Gambar 3. Portal SPBE Kabupaten Kubu Raya

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupa satu atau sekumpulan program komputer yang dirancang secara khusus untuk menjalankan tugas atau fungsi layanan SPBE (Adu et al., 2022). Program- program ini dibuat dengan tujuan untuk mendukung berbagai proses 57 administratif dan operasional dalam pemerintahan, sehingga dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, aplikasi SPBE membantu dalam mengurangi birokrasi yang

berlebihan, mempercepat penyampaian layanan publik, dan meningkatkan transparansi dalam berbagai proses pemerintahan. Dengan integrasi teknologi informasi, aplikasi ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan aplikasi SPBE juga berkontribusi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan kesalahan manusia dalam pengelolaan data dan informasi.

Setiap aplikasi SPBE terdiri dari serangkaian prosedur yang sistematis dan terstruktur, memastikan bahwa setiap tugas yang terkait dengan layanan pemerintah dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. Selain itu, aplikasi ini juga dirancang untuk memfasilitasi interaksi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, memberikan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap berbagai layanan publik. Dengan penggunaan aplikasi SPBE, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan, percepat proses pengambilan keputusan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Hal ini pada akhirnya akan membawa manfaat yang besar bagi peningkatan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sistem Penghubung Layanan merupakan alat integrasi yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran layanan SPBE antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi Pusat. Tujuan utama penggunaan sistem ini adalah mempermudah integrasi layanan, sehingga unit-unit pemerintahan dapat berkolaborasi dan berbagi informasi dengan lebih efisien, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan koordinasi penyediaan layanan publik. Dengan demikian, proses administrasi dan operasional pemerintahan menjadi lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan Aplikasi SPBE dan Sistem Penghubung Layanan juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan pemerintahan dengan mendukung proses administratif, mempercepat penyampaian layanan publik, serta meningkatkan transparansi. Melalui integrasi teknologi informasi, pemerintah mampu memberikan layanan yang lebih responsif dan akurat, meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data, dan memastikan koordinasi yang lebih baik. Secara keseluruhan, penerapan SPBE dan Sistem Penghubung Layanan berperan penting dalam optimalisasi sumber daya, peningkatan kinerja pemerintahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rozikin et al., 2020).

Transformasi pelayanan digital terpadu telah menjadi salah satu pilar utama dalam upaya modernisasi birokrasi dan pelayanan publik di berbagai negara (Pratama, 2024). Dalam era digital yang terus berkembang, integrasi teknologi informasi ke dalam sistem pelayanan publik bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyampaian pelayanan kepada masyarakat. Dengan mengadopsi platform digital yang terpadu, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, digitalisasi pelayanan juga membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Transformasi ini, meskipun kompleks dan penuh tantangan,

menjanjikan manfaat yang signifikan dalam jangka panjang, baik dari segi penghematan biaya operasional maupun peningkatan kualitas layanan publik.

Transformasi digital melibatkan pengalihan nilai dari proses bisnis kembali kepada pelanggan dan pengguna dengan memanfaatkan data dan analitik untuk menciptakan pengalaman yang baru dan inovatif (Tulungen et al., 2022). Transformasi digital merupakan proses strategis yang bertujuan untuk mengalihkan nilai dari operasional bisnis tradisional kepada pelanggan dan pengguna akhir. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, data, dan analitik yang canggih. Dengan mengintegrasikan teknologi ini, perusahaan dapat mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya. Hasilnya, nilai yang dihasilkan dari perbaikan ini dapat disalurkan kembali kepada pelanggan dalam bentuk layanan yang lebih baik, produk yang lebih berkualitas, dan pengalaman yang lebih memuaskan.

Penggunaan data dan analitik dalam transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik (Istiqomah, 2023). Data yang dihasilkan dari interaksi pelanggan dan operasional bisnis diolah untuk menghasilkan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan cara ini, perusahaan dapat menciptakan pengalaman baru yang lebih inovatif dan relevan bagi pelanggan. Misalnya, personalisasi layanan, rekomendasi produk yang lebih akurat, dan interaksi yang lebih responsif dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Transformasi digital, oleh karena itu, bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menciptakan nilai yang lebih besar dan relevan bagi pelanggan di setiap titik kontak.

Tim PKM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura berkesempatan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kubu Raya dengan tema "Transformasi Pelayanan Digital Terpadu". Diskusi ini menjadi wadah bagi para akademisi dan praktisi untuk bertukar pikiran dan mengidentifikasi strategi terbaik dalam menerapkan transformasi digital di sektor perpustakaan dan kearsipan. FGD ini juga memberikan kesempatan bagi para peserta untuk memahami tantangan dan peluang yang ada dalam proses digitalisasi, serta mengembangkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kubu Raya mengimplementasikan transformasi pelayanan digital sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Kebijakan ini memberikan kerangka kerja dan panduan bagi dinas dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam layanan mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan mengikuti kebijakan nasional, dinas dapat memastikan bahwa transformasi digital yang dilakukan selaras dengan visi dan misi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik di era digital.

Dalam diskusi tersebut, terdapat beberapa isu yang dibahas untuk kemudian dicari solusinya secara bersama-sama. Salah satu isu utama yang diangkat adalah adanya banyak ide yang inovatif, namun keterbatasan kemampuan atau sumber

daya menghambat implementasinya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kubu Raya, Bapak Rudianto, M.Pd., seperti terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 4. Penyampaian isu oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kubu Raya

Tim PKM dan Dinas Perpustakaan serta Kearsipan Kubu Raya menyadari bahwa meskipun ide transformasi digital sudah ada, realisasinya masih terkendala oleh keterbatasan keterampilan teknis, sumber daya finansial, dan infrastruktur teknologi. Diskusi difokuskan pada solusi seperti pelatihan peningkatan kapasitas, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pencarian sumber pendanaan alternatif untuk mempercepat transformasi digital. Pelatihan teknis bagi staf dan kerjasama dengan universitas maupun perusahaan teknologi diidentifikasi sebagai langkah penting untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan.

Selain pelatihan, dinas juga perlu mencari sumber pendanaan baru, seperti hibah atau bantuan dari organisasi internasional, untuk mendukung transformasi digital. Pencarian dana ini penting agar aspek teknis dan operasional dapat berjalan dengan lancar. Transformasi digital juga membutuhkan perubahan budaya organisasi, di mana staf harus didorong untuk lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif dalam menghadapi era digital.

Masalah teknis seperti situs web yang belum optimal, hosting, dan kesulitan dalam memposting konten juga menjadi hambatan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan digital. Ketidakseimbangan pendanaan, di mana perpustakaan berkinerja tinggi mendapat dana yang tidak sesuai, juga harus diperbaiki agar operasional dan pengembangan layanan publik dapat berjalan dengan baik. Penyelesaian tantangan ini membutuhkan kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga teknis, dan sektor swasta. Dengan kerjasama yang efektif, transformasi digital di Kubu Raya dapat berjalan lebih efisien, memperkuat pelayanan publik, dan mendukung perkembangan teknologi di daerah tersebut.

Dalam diskusi yang terlihat dari gambar di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kubu Raya mendapatkan pengakuan penting melalui akreditasi A pada tahun 2022, yang menilai kualitas layanan dan fasilitas perpustakaan. Akreditasi ini mencerminkan bahwa perpustakaan tersebut telah memenuhi standar operasional yang tinggi, mencakup aspek pelayanan, infrastruktur, serta manajemen sumber daya. Pencapaian ini tidak hanya meningkatkan reputasi

instansi, tetapi juga membuka peluang untuk menerima dukungan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan layanan publik.

Sebagai dampak dari akreditasi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menerima sejumlah bantuan signifikan, termasuk penyediaan gedung yang layak, dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta penambahan koleksi buku. Bantuan ini sangat penting dalam mendukung transformasi digital yang sedang berlangsung di Kubu Raya, Kalimantan Barat. Infrastruktur fisik yang memadai dan dukungan TIK memungkinkan perpustakaan untuk mengintegrasikan teknologi digital secara efektif, sementara koleksi buku yang lebih kaya memperkuat layanan perpustakaan.



Gambar 5. Diskusi lanjutan tim PKM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kubu Raya

Transformasi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan tidak hanya memperkuat infrastruktur dan sumber daya, tetapi juga memungkinkan penerapan layanan digital terpadu secara lebih efektif. Dengan adanya dukungan tersebut, dinas mampu memberikan layanan yang lebih baik dan lebih terintegrasi, sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memajukan digitalisasi di Kabupaten Kubu Raya.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan melibatkan peran aktif dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, serta partisipasi mahasiswa. Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini untuk memberikan kontribusi positif melalui kegiatan FGD demi meningkatkan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia serta efisiensi operasional dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kubu Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi inovatif guna meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan informasi, serta mengintegrasikan pengetahuan akademis, baik teoritis maupun praktis, dengan kebutuhan riil masyarakat.

Evaluasi dan tindak lanjut dari kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Transformasi Pelayanan Digital Terpadu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kubu Raya menunjukkan beberapa aspek penting. FGD telah berhasil menjadi platform yang efektif untuk pertukaran pengetahuan antara

akademisi dan praktisi, memungkinkan identifikasi berbagai isu terkait dengan transformasi digital. Beberapa kekurangan terungkap, termasuk keterbatasan sumber daya teknis dan finansial, masalah teknis pada situs web, serta ketidakcocokan antara kinerja perpustakaan dan alokasi dana yang diterima. Bantuan yang diterima dari akreditasi perpustakaan, seperti gedung dan dukungan teknologi, merupakan langkah positif yang mendukung transformasi digital.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, perlu dilaksanakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas staf secara terstruktur. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan teknologi digital, manajemen data, dan perangkat lunak perpustakaan untuk meningkatkan keterampilan teknis staf. Selain itu, penting untuk membangun kemitraan dengan universitas, perusahaan teknologi, dan lembaga non-pemerintah guna mendapatkan akses ke keahlian teknis dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk mendukung transformasi digital.

Perbaikan infrastruktur teknis juga menjadi prioritas penting. Masalah teknis terkait situs web, domain, dan hosting harus diatasi untuk meningkatkan fungsionalitas dan kecepatan akses layanan digital. Selain itu, proses posting konten perlu disederhanakan agar informasi dapat diperbarui dengan cepat dan akurat. Penyesuaian alokasi dana berdasarkan kinerja perpustakaan harus dilakukan untuk memastikan pendanaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan operasional dan pengembangan.

Langkah-langkah tindak lanjut ini juga mencakup pencarian pendanaan alternatif dan pengembangan budaya organisasi. Diversifikasi sumber pendanaan melalui hibah, sponsor, dan kemitraan dengan sektor swasta akan membantu menutupi kekurangan anggaran dan memungkinkan perpustakaan untuk berinovasi. Membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi dan adaptabilitas juga penting untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dan meningkatkan kualitas layanan publik. Kolaborasi antar instansi yang lebih luas diperlukan untuk menyelesaikan tantangan transformasi digital secara efektif dan menyeluruh.

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai transformasi pelayanan digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kubu Raya menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan kondisi sebelum diskusi berlangsung, terutama dalam hal strategi penerapan teknologi digital. Sebelum FGD, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan arah yang jelas terkait penerapan kebijakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam layanan perpustakaan dan kearsipan. Namun, setelah diskusi, peserta berhasil merumuskan strategi yang lebih terarah, termasuk langkah-langkah konkret untuk mengadopsi teknologi digital terbaru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efisiensi operasional di Dinas tersebut.

Selain itu, FGD ini juga menghasilkan kemajuan dalam hal integrasi sistem layanan. Sebelum diskusi, sistem yang digunakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masih terpisah-pisah, sehingga mempengaruhi efisiensi dan keterpaduan layanan. Setelah FGD, para peserta berhasil mengidentifikasi cara-cara untuk mengintegrasikan berbagai teknologi yang sudah ada. Rekomendasi

yang dihasilkan mencakup pengembangan sistem terpadu yang memungkinkan koordinasi lebih baik antar-layanan, sehingga mempermudah akses dan pengelolaan data di perpustakaan dan arsip secara keseluruhan.

Dari sisi aksesibilitas, sebelum FGD, layanan digital perpustakaan dan kearsipan dinilai belum sepenuhnya mudah diakses, terutama oleh masyarakat di daerah terpencil atau yang kurang familiar dengan teknologi. Setelah FGD, peserta sepakat untuk mengusulkan solusi yang lebih inklusif, seperti memberikan pelatihan bagi pegawai dan pengguna perpustakaan, serta pengembangan platform digital yang lebih ramah pengguna. Dengan demikian, hasil dari FGD diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas dan memperluas jangkauan layanan digital perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Kubu Raya, menjadikannya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kubu Raya pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Transformasi Pelayanan Digital menghadapi beberapa tantangan utama, termasuk keterbatasan sumber daya teknis dan finansial, masalah teknis pada situs web, dan ketidakcocokan antara kinerja perpustakaan dan alokasi dana. Untuk mengatasi hal ini, pelatihan terstruktur untuk staf dalam penggunaan teknologi digital dan manajemen data dan perangkat lunak perpustakaan adalah kunci untuk meningkatkan keterampilan teknis dan memastikan implementasi transformasi yang efektif sangat. Kolaborasi antara instansi dan sektor swasta juga diperlukan. Selain itu, penting untuk memperbarui informasi secara tepat waktu dan melakukan evaluasi serta penyesuaian alokasi dana agar sesuai dengan kebutuhan operasional. Mencari pendanaan alternatif seperti hibah dan sponsor dapat membantu mengatasi kekurangan anggaran dan mempercepat proses transformasi. Membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan adaptabilitas juga merupakan kunci keberhasilan transformasi digital, melibatkan komunikasi efektif dan penghargaan atas kontribusi staf.

Tingkat capaian dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kubu Raya dapat diukur melalui beberapa indikator. Berdasarkan hasil FGD, meskipun beberapa tantangan masih dihadapi seperti keterbatasan teknis dan finansial, tingkat keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya transformasi digital dan penyusunan rencana pelatihan terstruktur untuk staf dapat dinilai mencapai sekitar 70%. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam pemahaman dan kesiapan untuk melakukan perubahan, meskipun masih ada hambatan yang perlu diatasi.

Rencana tindak lanjut yang diusulkan mencakup beberapa langkah konkret. Pertama, pelatihan terstruktur akan diberikan kepada staf perpustakaan dalam bidang teknologi digital dan manajemen data. Kedua, kolaborasi antara instansi pemerintah dan sektor swasta akan diupayakan untuk memperkuat dukungan teknis dan finansial. Selain itu, evaluasi berkala terhadap alokasi dana dan kinerja perpustakaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada

digunakan secara efektif. Pencarian sumber pendanaan alternatif seperti hibah dan sponsor juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam mengatasi kekurangan anggaran.

Manfaat dari tindak lanjut ini, sejalan dengan metode *Participatory Action Research* (PAR), adalah terwujudnya solusi yang didorong oleh partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk staf perpustakaan, pemerintah daerah, dan komunitas lokal. Proses kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun budaya organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi. Dengan komunikasi yang efektif dan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan, transformasi digital di perpustakaan dapat mempercepat peningkatan layanan publik, memberikan akses informasi yang lebih baik bagi masyarakat, dan memperkuat efisiensi operasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Adu, A. La, Hartanto, R., & Fauziati, S. (2022). Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 5(3), 215–223. <https://doi.org/10.33387/jiko.v5i3.5344>
- Amryudin, A. D. K., Dharmaningtias, D. S., Savira, E. M., Katharina, R., & Sejati, S. B. (2022). *Kebijakan Satu Data Indonesia* (R. Katharina (ed.)). Publica Indonesia Utama.
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. ainur, & Rohmah, E. I. (2023). *Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia* (p. 25). <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 4(2), 226–239. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i2.1244>
- Guridno, A., & Roshinta, W. S. (2024). Pelayanan Kependudukan Berbasis Digital Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Cibereum, Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 45(1), 15–26. <https://doi.org/10.47313/jidb.v45i1.3034>
- Istiqomah, N. H. (2023). Transformasi Pemasaran Tradisional ke E-Marketing Tinjauan Literatur tentang Dampak Penggunaan Teknologi Digital Terhadap Daya Saing Pemasaran Bisnis. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(2), 1–14. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i2.2430>
- Majduddin, & Sutabri, T. (2024). Evaluasi Aplikasi Terpadu Satu Pintu dalam Metaverse dengan Pendekatan ITIL V3 untuk Meningkatkan Pelayanan Digital pada PT. Fiber Network Indonesia. *Jurnal Restikom: Riset Teknik Informatika Dan Komputer*, 6(1), 49–56. <https://doi.org/10.52005/restikom.v6i1.303>
- Ngamal, Y., & Perajaka, M. A. (2021). Penerapan Model Manajemen Risiko Teknologi Digital Di Lembaga Perbankan Berkaca Pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(2), 59–74. <https://doi.org/10.33541/mr.v2iiv.4099>

- Pangandaheng, F., Maramis, J. B., Saerang, D. P. E., Dotulong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). Transformasi Digital: Sebuah Tinjauan Literatur Pada Sektor Bisnis Dan Pemerintah. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 1106–1115. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41388>
- Pratama, W. A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Korupsi di Era Modernisasi Digital. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(1), 91–104. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1227>
- Prawira, M. G., & Paraniti, A. A. S. P. (2023). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(1), 82–89. <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.828>
- Putri, R. A., & Sembiring, S. B. (2021). Implementasi Aplikasi Desktop Publishing untuk Desain Flyer dan Kartu Nama dengan Metode Participatory Action Research (PAR). *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.55537/jibm.v1i1.1>
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. *Lex LATA*, 5(2), 218–239. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi Digital : Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 1116–1123. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41399>
- Wantiknas. (2020). Buletin Arah Transformasi Digital Indonesia. *Wantiknas*, 1–16.
- Yustisiawandana, F. T., & Aji, R. F. (2024). Perancangan Enterprise Architecture untuk Meningkatkan Indeks SPBE Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(1), 187–199. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i1.1133>